

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL

Dea Adzkia, 20150012, Fakultas Hukum, Sosial dan Humaniora, Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, 60
Halaman, 2024

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran ilegal asal berbagai negara, terutama dari laut. Permasalahan yang timbul akibat dari imigran ilegal seperti, krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya kasus-kasus imigran gelap. Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia merawankan masuknya imigran ilegal ke negara kepulauan yang luas ini. Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Fakta yang terjadi dilapangan yaitu sebanyak 190 orang pengungsi dalam kurun waktu 2023. Hingga kini tidak diketahui keberadaan Pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat penampungan tersebut Selama tahun 2023 ini Polresta Banda Aceh telah menangani sebanyak 469 imigran Rohingya yang terdiri dari 262 laki-laki dan 207 perempuan, dari jumlah itu, di antaranya 111 anak-anak. Mereka datang dengan empat gelombang pendaratan. Adapun gelombang pertama terdampar yakni pada Minggu 25 Desember 2022 di pantai Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar 57 orang. Bertujuan untuk pencari suaka yang bermaksud mendaftarkan diri ke Kantor UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) dengan mengatakan mereka membutuhkan perlindungan Internasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *proyustitia* atau tindak pidana di lembaga pasyarakatan apabila izinya telah habis masa berlakunya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan buku-buku, Undang-Undang, meneliti dan mempelajari dokumen seperti jurnal, skripsi dan referensi-referensi yang relevan terkait dengan Pengaturan dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Sedangkan teknik analisis data adalah dengan kualitatif .

Kata Kunci : Kedudukan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Imigran Illegal

THE POSITION OF IMMIGRATION CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN ENFORCING CRIMINAL LAW AGAINST ILLEGAL IMMIGRANTS

Dea Adzkia, 20150012, Faculty Of Law, Social and Humanities, Legal Studies, Dharma Andalas University, 60 Pages, 2024

ABSTRACT

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, is very vulnerable to various forms of crime by illegal immigrants. Indonesia's position with its vast land area and long coastline means that its territory is difficult to monitor against the entry of illegal immigrants from various countries, especially from the sea. Problems arising from illegal immigrants, such as the economic crisis, declining levels of welfare and security in many countries, and increasing poverty rates, as well as globalization and access to information, make it easier for cases of illegal immigrants to occur. The limited security of Indonesia's maritime borders makes it vulnerable to the entry of illegal immigrants into this vast archipelagic country. Law enforcement can be interpreted as implementing the law by law enforcement officers and everyone who has interests and according to their respective authorities according to applicable legal regulations. The facts that occurred in the field were that there were 190 refugees in the period 2023. Until now the whereabouts of the Rohingya refugees who escaped from the shelter are unknown. During 2023, the Banda Aceh Police have handled 469 Rohingya immigrants consisting of 262 men and 207 women, of that number, 111 were children. They came in four landing waves. The first wave was stranded on Sunday 25 December 2022 on Ladong beach, Mesjid Raya District, Aceh Besar Regency, 57 people. Aims at asylum seekers who intend to register with the UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Office saying they need international protection. Meanwhile, according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, it is stated that basically the presence of foreign nationals in Indonesia remains limited and foreign citizens who are in Indonesia are required to have a valid immigration permit, except for those who are currently undergoing a prejudicial process or crime. criminal punishment in a correctional institution if the permit has expired. The type of approach in this research is normative juridical and case approach. The legal materials used are primary legal materials, namely: Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The data collection technique is by collecting books, laws, researching and studying documents such as journals, theses and relevant references related to Immigration Law Regulation and Enforcement. Meanwhile, the data analysis technique is qualitative.

Keywords: Position, Law Enforcement, Crime, Illegal Immigrants